

Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Siswa SMA: Kajian Pustaka

Anwar Ibrahim¹, Arica Safitri², Della Machza Nurkhaliza³, Desman Zaya Gea⁴

¹⁻⁴Universitas Pamulang, Indonesia

E-mail: ewoanwar77@gmail.com

Abstract

Legal awareness is a crucial element in shaping the character of law-abiding and responsible citizens. Amid the rising number of legal violations involving students, there is an urgent need to strengthen legal understanding from an early age through education. Pancasila Education, as one of the subjects that instills fundamental national values, holds strategic potential in fostering students' legal awareness. However, in practice, there exists a gap between the normative goals of Pancasila Education and students' actual understanding of legal concepts. This study aims to examine the strategic role of Pancasila Education in shaping legal awareness among senior high school students through a literature review approach. The method employed involves analyzing scholarly books, national journals, conference proceedings, and relevant educational policy documents. The findings reveal that Pancasila values such as justice, responsibility, and adherence to social and legal norms are highly relevant in cultivating students' legal attitudes. Nonetheless, strengthening this role requires a contextual and participatory pedagogical approach. The study concludes that Pancasila Education can serve as a key instrument in fostering students' legal awareness, provided it is systematically and applicatively integrated into the school learning process.

Keywords: Legal Awareness, National Values, High School Students, Civic Education

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya pelanggaran hukum yang melibatkan pelajar, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman hukum sejak dini melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan memiliki potensi strategis dalam membentuk kesadaran hukum siswa. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif Pendidikan Pancasila dengan realitas pemahaman hukum siswa di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA melalui pendekatan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah buku-buku ilmiah, jurnal nasional, prosiding, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum memiliki relevansi kuat dalam membentuk sikap hukum siswa. Namun, penguatan peran ini memerlukan pendekatan pedagogis yang kontekstual dan partisipatif. Simpulan dari kajian ini menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dapat menjadi instrumen kunci dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa, asalkan diintegrasikan secara sistematis dan aplikatif dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Nilai-Nilai Kebangsaan, Siswa SMA, Pendidikan Pancasila

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan elemen fundamental dalam pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab, patuh terhadap peraturan, serta mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional (Izma & Kesuma, 2019). Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, internalisasi kesadaran hukum diposisikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai melalui aktivitas pembelajaran, terutama dalam ranah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila (Pangalila, 2017). Sayangnya, berbagai data menunjukkan bahwa pelanggaran norma hukum di kalangan pelajar, terutama siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), masih cukup tinggi. Kasus-kasus seperti perundungan (*bullying*), tawuran pelajar, pelanggaran lalu lintas, hingga ketidaktaatan terhadap peraturan sekolah menjadi indikator lemahnya kesadaran hukum di kalangan remaja (Saputra et al., 2021) . Situasi tersebut menimbulkan tantangan substansial bagi sektor pendidikan dalam mengembangkan peran strategisnya membentuk generasi muda yang tidak hanya sadar akan nilai-nilai hukum, tetapi juga menjunjung tinggi integritas sebagai warga negara yang berorientasi pada kepentingan bangsa.

Pendidikan Pancasila berperan sebagai mata pelajaran wajib yang mengintegrasikan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks perkembangan zaman saat ini (Alisah, 2025). Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, tanggung jawab, gotong royong, dan penghargaan terhadap hak orang lain, memiliki keterkaitan langsung dengan aspek-aspek kesadaran hukum. Menurut (Amalia & Najicha, 2022), Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk kerangka konseptual dan pola perilaku warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penginternalisasian nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dapat dijadikan sebagai strategi utama dalam menanamkan kesadaran hukum secara sistematis.

Akan tetapi, dalam implementasi pembelajaran di tingkat sekolah, pendidikan Pancasila masih sering difokuskan pada aspek hafalan semata, dengan pendekatan yang cenderung terbatas pada dimensi kognitif dan normatif. Penelitian oleh (Kurniawaty, 2022) menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila di tingkat SMA cenderung belum menyentuh ranah afektif dan psikomotor secara optimal, sehingga siswa kesulitan mengaitkan materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks hukum. Di sisi lain, penelitian (Sila, 2024) dapat digarisbawahi bahwa pengintegrasian nilai-nilai hukum

dalam pembelajaran pendidikan Pancasila harus dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual, sehingga memungkinkan siswa untuk secara aktif menginternalisasi dan menerapkan makna hukum dalam konteks kehidupan sosial mereka.

Lebih lanjut, teori kesadaran hukum menurut (Gufran & Rostati, 2025) menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak cukup hanya dibangun melalui pengetahuan tentang aturan, tetapi juga melalui pemahaman akan nilai di balik aturan dan kesediaan untuk menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari kehidupan. Di sinilah peran pendidikan Pancasila menjadi signifikan, karena pendidikan ini bukan sekadar mengenalkan aturan hukum, tetapi membentuk kepribadian siswa yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial.

Sayangnya, kajian-kajian sebelumnya cenderung memisahkan antara studi kesadaran hukum dengan studi pendidikan Pancasila, sehingga hubungan fungsional antara keduanya belum tergali secara menyeluruh (Belladonna & Anggraena, 2019). Beberapa penelitian juga lebih menitikberatkan pada pendidikan hukum formal atau penguatan pendidikan karakter secara umum, tanpa menelusuri secara khusus kontribusi pendidikan Pancasila dalam membentuk sikap hukum siswa (Anugrah & Rahmat, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian literatur yang secara kritis dan mendalam membahas peran strategis pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum siswa SMA, dengan pendekatan yang holistik dan integratif.

Kajian ini menggunakan kerangka teori pendidikan nilai, teori kesadaran hukum, dan pendekatan konstruktivisme sebagai dasar analisis. Pendidikan nilai menekankan pentingnya internalisasi dalam membentuk karakter, konstruktivisme menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembentukan pengetahuan dan sikap, sementara teori kesadaran hukum memberikan perspektif mengenai bagaimana nilai dan norma hukum diinternalisasi dalam diri individu (Fadillah & Kuswanto, 2024). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab kekosongan dalam *literatur* sebelumnya dan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran pendidikan Pancasila dalam membentuk generasi yang sadar hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran strategis pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA melalui pendekatan kajian pustaka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *studi literatur* yang berfokus pada analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka relevan. Subjek kajian dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen ilmiah berupa buku, artikel jurnal terakreditasi, prosiding akademik, serta regulasi pendidikan yang berkaitan dengan peran pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber primer yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir, dengan mempertimbangkan relevansi substansi dan kualitas akademiknya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses interpretasi, kategorisasi tematik, dan sintesis pemikiran untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap peran strategis peran pendidikan Pancasila dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, diperoleh gambaran bahwa pendidikan Pancasila berperan penting dalam menata kesadaran hukum bagi siswa SMA. Pendidikan Pancasila, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter siswa agar memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Subianto, 2016). Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, penghargaan terhadap hak dan kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara, menjadi dasar normatif yang dapat mengarahkan perilaku siswa terhadap sikap sadar hukum.

Hasil ini didukung oleh penelitian (Bramantyo & Suwarno, 2020) yang menemukan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran efektif dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa. Nilai-nilai seperti keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila terbukti berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku hukum peserta didik.

Lebih jauh, penelitian oleh (Yuniarto, 2020) menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran kontekstual dalam mengajarkan pendidikan Pancasila. Ia menemukan bahwa siswa yang dilibatkan secara aktif dalam diskusi kasus-kasus hukum aktual dan diberi ruang untuk mengekspresikan pandangannya menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap

norma hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian pustaka dalam penelitian ini yang menyarankan pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan reflektif.

Namun, masih ditemukan tantangan dalam implementasi kurikulum pendidikan Pancasila, sebagaimana disampaikan oleh (Mihit, 2023), bahwa seringkali materi hanya disampaikan secara teoritis dan tidak dikaitkan dengan konteks sosial siswa. Kondisi tersebut berdampak pada kesulitan siswa dalam mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan penerapan nyata hukum dalam konteks sosial di sekitarnya.. Sehingga, peran guru sangat krusial dalam menjembatani konsep hukum dengan praktik di lapangan. Guru yang mampu menyajikan materi secara menarik, disertai contoh konkret, dan membimbing siswa dalam proses refleksi kritis dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Mufatikhah et al., 2023).

Dukungan lingkungan sosial, seperti keluarga dan masyarakat, juga turut menentukan kesadaran hukum siswa. (Wardoyo et al., 2022) menegaskan bahwa lingkungan yang mendukung perilaku taat hukum akan memperkuat hasil dari pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah. Kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sosialisasi nilai yang terus-menerus dalam berbagai lingkungan kehidupan siswa.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori internalisasi nilai oleh Milton Rokeach. Dalam kerangka ini, nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan Pancasila akan menjadi bagian dari sistem kepercayaan siswa dan memengaruhi perilaku mereka secara konsisten dalam jangka panjang. Proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan nilai, jika dilakukan secara kontekstual, reflektif, dan berkelanjutan, akan melahirkan generasi muda yang sadar hukum.

(Haliza & Dewi, 2021) juga menambahkan bahwa praktik kehidupan sekolah, seperti keterlibatan siswa dalam penyusunan dan pelaksanaan tata tertib sekolah, memberi dampak signifikan dalam membentuk budaya hukum siswa. Ketika siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan aturan sekolah, mereka belajar untuk memahami makna dari aturan tersebut dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus didukung oleh praktik-praktik pendidikan yang demokratis dan partisipatif.

Lebih dari itu, pendidikan Pancasila memiliki potensi sebagai instrumen transformasi sosial. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya tantangan terhadap supremasi hukum di Indonesia, pendidikan Pancasila dapat menjadi benteng pertahanan nilai dan norma. Melalui

pendidikan yang berorientasi pada nilai, generasi muda dapat dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga memiliki integritas moral dalam menegakkan keadilan (Adiyatma, 2023).

Oleh karena itu, strategi penguatan pendidikan Pancasila perlu diarahkan pada aspek implementatif. Materi ajar hendaknya disesuaikan dengan konteks lokal dan fenomena hukum yang aktual (Saputra et al., 2021). Selain itu, pelatihan bagi guru dalam menyampaikan materi hukum secara kontekstual, interaktif, dan aplikatif harus menjadi prioritas dalam pengembangan profesionalisme pendidik.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila memegang peran sentral dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan siswa SMA. Namun, keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan, kualitas guru, keterlibatan lingkungan sosial, dan konsistensi kebijakan pendidikan (Lubis, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai hukum melalui pendidikan Pancasila.

Implikasi dari hasil ini adalah perlunya perumusan strategi pendidikan nilai yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam kurikulum pendidikan Pancasila. Pengembangan metode pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar siswa secara langsung, serta evaluasi yang menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, menjadi bagian penting dalam mendukung upaya menata kesadaran hukum di kalangan siswa SMA.

Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya berperan dalam membentuk identitas kebangsaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat landasan hukum generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila berperan signifikan dalam menata kesadaran hukum siswa SMA dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar bangsa yang berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pemahaman kognitif terhadap norma, tetapi juga oleh pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan reflektif yang memungkinkan siswa mengalami secara langsung makna dan pentingnya hidup dalam tatanan hukum. Pendidikan

Pancasila tidak hanya relevan sebagai wahana pembentukan karakter kebangsaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat budaya hukum generasi muda. Oleh karena itu, penguatan Pendidikan Pancasila sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum memerlukan kebijakan kurikulum yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, peningkatan kapasitas guru, serta kolaborasi yang holistik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan nilai yang lebih aplikatif, serta menawarkan arah transformasi pendidikan hukum yang berkelanjutan di tingkat pendidikan menengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih khusus kami tujuhan kepada pimpinan institusi, tim pelaksana, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan moril, material, dan partisipasi aktif. Penghargaan juga kami berikan kepada pihak-pihak lain yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kerja sama dan kontribusi yang diberikan menjadi amal baik dan membawa manfaat bagi semua pihak.

REFERENSI

- Adiyatma, M. R. (2023). Peran Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan di Indonesia: Analisis Pengaruhnya terhadap Pengembangan Etika Dan Moral. *National Conference for Ummah*, 1(1). <https://conferences.unusa.ac.id/index.php/NCU2020/article/view/1098>
- Alisah, P. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Disrupsi Sosial. *Jurnal Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i2.371>
- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Lunturnya Nilai Nasionalisme Dan Cinta Nkri Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2511>
- Anugrah, & Rahmat. (2024). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JUPI)*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.53299/jppiv4i1.403>

- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Bramantyo, R. Y., & Suwarno, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(2), 124–136. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i2.627>
- Fadillah, E. N., & Kuswanto, feri. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55732/jmi.v3i2>
- Gufran, & Rostati. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda: Kajian Pustaka. *JPK: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 02(01). <https://doi.org/10.56842>
- Haliza, V. N., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa Ditengah Arus Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(2). <https://doi.org/PendidikanKewarganegraandalamMenjawabTantanganMasaDepanBangsaDitengahArusGlobalisasi>
- Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika*, 17(1), 84–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v17i1.2419>
- Kurniawaty, J. B. (2022). Penerapan Nilai Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 1(2). <https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita>
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4660>
- Mihit, Y. (2023). Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi: Tinjauan Literatur. *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2023(1), 357–366. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/141>
- Mufatikhah, N., Rondli, W. S., & Santoso. (2023). Strategi Guru Dalam Motivasi Belajar PPKn Siswa SD. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 465–471. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4667>
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3553>
- Saputra, A. R., Dewi, A. P., Purnomo, S. H., Nurwahyu, S., Indarwatin, A. R., & Ghazali, I. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Berbangsa

dan Bernegara di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i2.137>

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civic Education Research*, 2(1). <https://doi.org/Https://Doi.Org/10.60153/Jocer.V2i1.49>

Subianto, J. (2016). Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>

Wardoyo, Y. P., Cholidah, T., & Suwandyani, B. I. (2022). Pendampingan Sekolah Ramah Anak Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Sejak Dini Pada Siswa Di Sd Muhammadiyah 3 Assalam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 1663–1670. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/eamal.v3i1.2402>

Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/eduksos.v9i1.6388>